

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DANA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN NGADA

Agustina Ngene^{1*}, Jennie S. Sir², dan Alfred T. Rantelobo³

^{1,2} Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang

*E-mail: AgustinaNgene@mail.com

Abstract

The problem in this research is that it is known that many people are upset and disappointed, because the submission of the proposal does not match the realization in the disposition of Plt. Regent Ngada, even and not comparable to community expectations. The purpose of this research is to find out and explain : 1. As well as what factors influence the implementation of social assistance funds sourced from APBD in Ngada Regency. 2. How the effectiveness of the implementation of social assistance funds sourced from APBD in Ngada Regency. The research method used is descriptive quantitative research methods. The data analysis technique used by researchers is descriptive quantitative analysis. The results showed that the implementation of social assistance funds in Ngada Regency was quite effective and is strongly influenced by various factors including the quality of the apparatus, facilities and infrastructure, as well as supervision from the local government. The conclusion in this study is that the implementation of social assistance funds in Ngada Regency has currently been implemented quite effectively and is influenced by various factors, namely the quality of the apparatus, facilities and infrastructure and supervision. So that in the future the local government of Ngada Regency will be more active in supervising and monitoring the implementation of social assistance funds in terms of absorption or use of budgets as well as administration of social assistance funds.

Keywords: Effectiveness, implementation, social assistance fund.

PENDAHULUAN

Dana Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Sifat bantuan ini tidak secara terus menerus dan selektif, bantuan ini berupa uang atau barang yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberian dana bantuan sosial ini bersumber dari keuangan daerah (APBD) yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah beberapa kali dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Kedua peraturan tersebut tidak mensyaratkan calon penerima bantuan sosial yang tercantum dalam APBD yang telah dibahas sehingga kepala daerah diberi wewenang untuk menetapkan penerima dan besarnya dana bantuan sosial

pada tahun berjalan sesuai dengan proposal yang masuk dan sesuai dengan kebijakan kepala daerah.

Dana bantuan sosial yang merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selayaknya dikelola secara tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, dan efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan selalu memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan serta menciptakan tertib administrasi, akuntabilitas, transparansi, dalam pengelolaan dana bantuan sosial serta ketepatan dalam penggunaan dana bantuan sosial oleh masyarakat yang menerimanya. Dalam pelaksanaan dana bantuan sosial harus tepat pada sasaran dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Ngada pada hari Jumad (28/12/2018) kembali didatangi masyarakat Ngada calon penerima dana bantuan sosial atau yang lebih dikenal

dengan bansos. Berdasarkan pantauan *radarntt* di lokasi, masyarakat memadati kantor DPKAD Kabupaten Ngada sejak pukul 07:00 pagi hingga pukul 22:00 malam. Saat itu diketahui banyak masyarakat yang kesal dan kecewa, pasalnya pengajuan dalam proposal tidak sesuai dengan realisasi dalam disposisi Plt. Bupati Ngada, bahkan dan tidak sebanding dengan harapan masyarakat. Salah seorang warga mengemukakan kepada *watawan*, saat dirinya melengkapi berkas permohonan dana bansos dalam proposal yang diajukan dalam kelompok usaha ternak babi sebesar Rp.53.600.000. Namun, dalam lembaran disposisi Plt Bupati Ngada hanya sebesar Rp.3.000.000. Selain itu dalam lembaran permohonan pencairan yang dibagikan pegawai kantor keuangan tertulis jumlah dana yang diajukan sebesar Rp.3.000.000. Hal ini dianggap sebagian besar masyarakat Ngada tidak sesuai dengan dana permohonan yang diajukan dalam proposal. Terlihat kebanyakan warga merasa bingung karena dalam pengajuan proposal dana sebesar Rp.30.000.000 namun, dana dikucurkan hanya sebesar Rp.5.000.000 sedangkan yang mengajukannya sebesar Rp.7.000.000 namun yang direalisasikan sebesar Rp.3.000.000. Sementara itu ada yang lebih mengherankan dimana seorang warga mengungkapkan kepada media "Nama saya belum juga dipanggil dari kantor keuangan, sementara proposal saya masuk dalam APBD induk Tahun Anggaran 2017, tetapi hingga saat ini belum juga dipanggil untuk melengkapi berkas pencairan." Informasi yang berhasil dihimpun bahwa data Bantuan Sosial tahun 2018 di Kabupaten Ngada yakni, dana Induk tahun 2018 adalah sebesar Rp.14.474.933.417, dan selanjutnya pada anggaran perubahan daerah tahun 2018 kembali dianggarkan dan ditetapkan pasca pertengahan tahun dengan besaran nilai Rp.15.766.500.000.

Rangkuman advokasi media bersama sejumlah unsur investigasi di daerah mengungkapkan pola pencairan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada mempunyai sejumlah catatan aneh. Berikut rangkuman data media dan wartawan lapangan dari advokasi yang diikuti selama tahun 2018 yaitu:

1. Dana Induk Tahun 2018 yang ditetapkan awal tahun 2018 nomen klatur Bansos senilai Rp.14.474.933.417,00 hingga tanggal 3 Desember 2018 belum diketahui berapa persen yang sudah dicairkan.
2. Warga calon Penerima mengajukan permintaan dalam bentuk proposal sudah diajukan sejak lima hingga enam bulan sebelumnya dari bulan Desember 2018. Kesaksian warga pada akhir bulan November dan Desember baru mulai dengan vase tanda tangan.
3. Setelah tanda tangan di Keuangan Daerah, pencairan masih menunggu lagi.
4. Meski belum dicairkan, Bansos untuk termin Anggaran Perubahan Daerah 2018 kembali dianggarkan pasca pertengahan tahun dengan besaran nilai Rp.15.766.500.000,00. Sedangkan bansos dari dana induk belum cair.
5. Warga calon penerima lagi-lagi mengajukan permintaan untuk Bansos perubahan.
6. Terhadap Bansos perubahan, ada yang sudah tanda tangan, kebanyakan belum dipanggil untuk tanda tangan di Kantor Keuangan Daerah walaupun sudah masuk akhir tahun alias bulan Desember.
7. Berikut lagi-lagi bansos untuk Anggaran Induk Tahun 2019 juga sudah dipersiapkan dan nantinya diikuti PERDA atau segera dalam waktu dekat akhir tahun di -PERDA-kan.

Dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu dilakukan penyesuaian tentang cara penganggaran, pencairan, dan pertanggung jawaban, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, serta bagaimana hasil audit BPK mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD kepada masyarakat dan faktor atau kendala apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan dana bantuan sosial tersebut. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka pemerintah daerah harus menggunakan dan bantuan sosial dan penerimaan hibah dengan penuh tanggungjawab. Pengawasan dalam penggunaan dan bantuan sosial dapat dilakukan dengan mengakses laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk transparansi yang menunjukkan adanya keterbukaan dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerahnya.

Banyak penelitian terkait penyaluran dana bantuan sosial (Mariswara et al, 2016; Yuliantari dan Aswitari, 2018; Arifin et al., 2017). Hasil para peneliti juga menunjukkan hasil yang berbeda beda. hasil yang diperoleh bahwa pelaksanaan belanja bantuan sosial di Kabupaten Pontianak masih belum efektif

(Achyani dan Saleh, 2014). Penelitian ini ingin menguji kembali tentang efektifitas dana bantuan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Ngada.

Berdasarkan permasalahan mengenai dana bantuan sosial yang terjadi di Kabupaten Ngada, membuat penulis merasa tertarik dan terkesan untuk melihat bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan dana bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas DPPKAD dalam merencanakan dan merealisasi dana bantuan sosial yang diajukan oleh masyarakat dalam pengajuan proposal dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta melihat perbandingan antara tager (yang dianggarkan) dengan realisasinya, sehingga penulis mengangkat judul yaitu "**Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dana Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Ngada**".

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ngada yang saat ini telah digantikan menjadi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada yang berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta Kelurahan Ngedukelu Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pelaksanaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD di Kabupaten Ngada. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan alasan dalam penelitian ini peneliti akan menghitung efektivitas pelaksanaan program/ kegiatan dana bantuan sosial dan menghitung efektivitas kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat penerima dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada.

Populasi penelitian ini ialah seluruh penerima dana bantuan sosial yang tersebar di Kabupaten Ngada. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (Arikunto, 2006). *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu dimana sampel dialokasikan dari penerima manfaat dana bantuan sosial yang berada di Kecamatan Golewa Barat Kabupaten Ngada dimana kecamatan tersebut merupakan kecamatan dengan penerima dana bantuan sosial terbanyak dan memiliki kelompok usaha yang bervariasi.

Data kuantitatif yang akan diperoleh peneliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran, dan jumlah penerima dana bantuan sosial. Data kualitatif yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah gambaran umum instansi/organisasi tempat penelitian dan program atau kegiatan yang bersumber dari dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sumber data primer adalah hasil analisa terhadap kuesioner yang akan disebarakan ke masyarakat penerima dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada, dan wawancara secara langsung dengan kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta pegawai atau staf yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada. Penelitian ini data sekunder yang akan diperoleh peneliti yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan LRA yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuisisioner, dan wawancara serta dokumentasi (Sugiyono, 2013). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu setiap pernyataan telah disertai sejumlah pilihan jawaban yang kemudian responden hanya memilih yang paling sesuai. Skala alternatif jawaban yang digunakan adalah skala likert yang telah dimodifikasi, dimana setiap item pertanyaan dari kuesioner mempunyai 5 alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada para informan (Iskandar, 2008). Untuk dapat mempermudah proses wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam tahap dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti, catatan, ataupun dokumen yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan anggaran dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Ngada tahun anggaran 2017-2019.

Uji kualitas data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas. Teknis analisis data menggunakan Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel (Sujarweni, 2014). Peneliti menganalisis data yang didapat dari kantor

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ataupun instansi terkait dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan dana bantuan sosial yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2017-2019.

1) Efektivitas Realisasi Anggaran diukur dengan rumus (Mardiasmo 2002) sbb:

Tingkat Efektivitas =

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran Dana Bantuan Sosial}}{\text{Target Anggaran Dana Bantuan Sosial}} \times 100\%$$

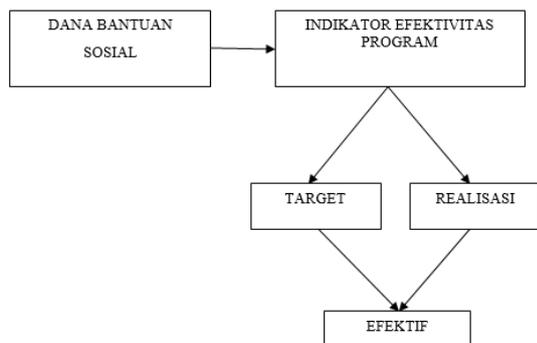
2) Efektivitas Program diukur dengan rumus (Mardiasmo, 2002) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{outcome}}{\text{output}} \times 100\%$$

3) Kriteria efektifitas menggunakan (Mamudi, 2016) dengan cara sbb:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{skor Rill}}{\text{Skor Harapan}} \times 100\%$$

Kerangka berpikir dalam efektivitas pelaksanaan dana bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Ngada sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data bantuan sosial yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada pada tahun 2017-2019 diketahui bagaimana besaran target, realisasi dan jumlah penerima dana bantuan sosial serta program atau kegiatan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ngada tersaji di tabel 1 dan tabel 2.

Tabel 1. Hasil Data Bantuan Sosial

| No | Tahun | Target | Realisasi | Jumlah Penerima |
|----|-------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2017 | 16.509.925.000 | 16.383.953.000 | 679 |

| | | | | |
|---|------|----------------|----------------|------|
| 2 | 2018 | 18.876.500.000 | 14.710.000.000 | 1747 |
| 3 | 2019 | 10.400.850.010 | 3.031.920.000 | 224 |

Uji Validitas menunjukkan bahwa hasil kuisioner valid tersaji pada tabel 3. Dasar pengambilan uji realibilitas menurut Sujerweni (2014) kuisioner dinyatakan *reliable* jika nilai *cronbach alpha* > 0,6 tersaji pada tabel 4.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| No | Butir Pernyataan | Rhitung | rtabel | Ket |
|----|------------------|---------|--------|-------|
| 1 | X1 | 0,404 | 0,339 | Valid |
| 2 | X2 | 0,588 | 0,339 | Valid |
| 3 | X3 | 0,457 | 0,339 | Valid |
| 4 | X4 | 0,615 | 0,339 | Valid |
| 5 | X5 | 0,429 | 0,339 | Valid |
| 6 | X6 | 0,436 | 0,339 | Valid |
| 7 | X7 | 0,442 | 0,339 | Valid |
| 8 | X8 | 0,588 | 0,339 | Valid |
| 9 | X9 | 0,615 | 0,339 | Valid |
| 10 | X10 | 0,442 | 0,339 | Valid |
| 11 | X11 | 0,529 | 0,339 | Valid |
| 12 | X12 | 0,492 | 0,339 | Valid |
| 13 | X13 | 0,457 | 0,339 | Valid |
| 14 | X14 | 0,588 | 0,339 | Valid |
| 15 | X15 | 0,404 | 0,339 | Valid |

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| Cronbach alpha | N of Items |
|----------------|------------|
| 0,785 | 15 |

Identifikasi masyarakat menurut jenis kelamin menunjukkan jumlah masyarakat laki-laki yang menjadi responden adalah sebanyak 25 orang atau 74% sedangkan jumlah masyarakat perempuan yang menjadi responden adalah sebanyak 9 orang atau 26% yang terjadi pada tabel 5.

Tabel 5. Responden Berdasar Jenis Kelamin

| No | Kategori | Jumlah | (%) |
|--------|-----------|--------|------|
| 1 | Laki-laki | 25 | 74% |
| 2 | Perempuan | 9 | 26% |
| Jumlah | | 34 | 100% |

Penyajian hasil pengolahan Kuesioner yang disebarkan kepada masyarakat berdasarkan deskripsi variabel pelaksanaan dana bantuan sosial yang pernyataanya diperoleh dari indikator maupun ukuran efektivitas dengan 15 item pernyataan dapat terangkum pada tabel 6.

Tabel 2. Data Program Bantuan Sosial

| No | Tahun | Program/ Kegiatan | Target | Realisasi | Jumlah penerima |
|----|-------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2017 | Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat | 1.845.000.000 | 1.845.000.000 | 179 |
| | | Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat | 14.664.925.000 | 14.538.953.000 | 500 |
| 2 | 2018 | Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan | 150.000.000 | 100.000.000 | 2 |
| | | Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat | 10.009.500.000 | 8.460.000.000 | 973 |
| | | Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat | 8.717.000.000 | 6.150.000.000 | 772 |
| 3 | 2019 | Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan | 725.000.000 | 90.000.000 | 3 |
| | | Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat | 3.857.000.010 | 1.167.500.000 | 117 |
| | | Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat | 5.818.850.000 | 1.774.420.000 | 104 |

Tabel 6. Persentase Tingkat Efektivitas

| Item pertanyaan | Efektifitas |
|-----------------|-------------|
| 1 | 52% |
| 2 | 53% |
| 3 | 53% |
| 4 | 54% |
| 5 | 55% |
| 6 | 52% |
| 7 | 52% |
| 8 | 52% |
| 9 | 54% |
| 10 | 53% |
| 11 | 55% |
| 12 | 55% |
| 13 | 53% |
| 14 | 52% |
| 15 | 51% |

Pembahasan
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada.

Kualitas aparatur dalam hal ini merupakan kualitas sumber daya manusia yang pada dasarnya meliputi pengetahuan, kemampuan, kemauan, dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan kepala badan keuangan daerah sebagai berikut:

“Apabila pegawai yang bekerja di lembaga ini memiliki kompetensi dan berkualitas maka segala pekerjaan dan hal yang berkaitan dengan urusan masyarakat dalam hal ini pelaksanaan penyaluran bansos akan terlaksana sesuai dengan apa yang telah

direncanakan terlebih dahulu”.

Sarana merupakan penunjang atau peralatan kerja dimana merupakan bagian penting dalam terlaksananya suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. Faktor sarana dan prasarana menjadi hal utama dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah, serta untuk mempermudah dan memperlancar gerak dan aktivitas pemerintah. Sarana dan prasarana selain manusia, terdapat juga dana atau anggaran yang merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran dan output konkrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan kepala badan keuangan daerah sebagai berikut:

“Adanya dana atau anggaran membuat lembaga ini bersama pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengurus dana bansos harus memiliki sarana prasarana pendukung untuk mencapai terlaksananya segala kegiatan atau program untuk bisa mencapai hasil yang baik dan para pegawai dalam lembaga ini harus bisa bekerja sama terkhusus bagian keuangan yang mengatur dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan bansos untuk masyarakat, maupun kelompok organisasi yang ada di kabupaten Ngada”.

Pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi atau perusahaan akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, intruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pengawasan dapat mencegah terjadinya

penyimpangan, pemborosan, penyelewengan hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan wawancara dengan kepala badan keuangan daerah sebagai berikut:

“Sebagai pimpinan saya harus mengawasi setiap pekerjaan dari pegawai disini, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan segala urusan dan kepentingan dalam lembaga kerja ini, hanya saja ada saat-saat dimana saya mempunyai banyak kesibukan dan tidak sempat mengawasi kerja dari pegawai di lembaga ini”.

Efektivitas pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada.

Berdasarkan analisis data perhitungan tingkat efektivitas dana bantuan sosial di kabupaten Ngada dapat diketahui bagaimana tingkat pencapaian anggaran dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Ngada mengalami perbedaan disetiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 anggaran dana bantuan sosial memperoleh tingkat pencapaian 99%, tahun 2018 sebesar 78%, dan di tahun 2019 sebesar 29%, dan mengalami penurunan jumlah masyarakat penerima dana bantuan sosial yaitu tahun 2017 berjumlah 769 orang, tahun 2018 berjumlah 1.747 orang dan tahun 2019 berjumlah 224 orang. Data program dana bantuan sosial yang telah diolah pada perhitungan diatas dapat diketahui tingkat pencapaiannya yaitu untuk program atau kegiatan di tahun 2017 dimana program belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat mencapai 100% dengan jumlah penerima sebanyak 179 kelompok dan program belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat mencapai 99% dengan jumlah penerima 500 orang, tahun 2018 untuk program belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan mencapai 67% dengan jumlah penerima 2 organisasi, program belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat mencapai 85% dengan jumlah penerima 973 kelompok dan program belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat mencapai 71% dengan jumlah penerima 772 orang, tahun 2019 untuk program belanja bantuan organisasi kemasyarakatan mencapai 12% dengan jumlah penerima 3 organisasi, program belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat mencapai 30% dengan jumlah penerima 117 kelompok dan program belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat mencapai 30% dengan jumlah penerima 104 orang. Namun, melihat semakin berkurangnya masyarakat

penerima bantuan di tahun 2019 dengan anggaran yang besar tetapi dana yang terealisasi tidak sebanding. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian seperti pada pernyataan masyarakat yang mengatakan cukup setuju dalam pernyataan terkait pelaksanaan dana bantuan sosial tersebut.

Dalam pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada berdasarkan hasil pengelolaan kuesioner atas pernyataan-pernyataan yang telah disebarkan kepada masyarakat penerima dana bantuan diketahui bahwa dari 15 item pernyataan yang disebarkan sesuai dengan pengelolaan data yang disajikan oleh peneliti pencapaian dari setiap pernyataan berkisar 51% sampai dengan 55% sesuai kriteria dinyatakan tidak efektif, tetapi dari pernyataan tersebut masyarakat memilih dari rentan cukup setuju sampai dengan sangat setuju.

Diketahui bagaimana tanggapan masyarakat atas pelaksanaan atau tindakan nyata pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial ke masyarakat, diketahui bahwa dana bantuan sosial yang disalurkan ke masyarakat penerima dana bantuan sosial sesuai dengan proposal pengajuan sesuai dengan banyaknya tanggapan masyarakat atas pernyataan tersebut pada kuesioner yang telah disebarkan, untuk penyalurannya badan keuangan daerah bekerja sama dengan pihak bank dimana dana yang diajukan masyarakat di transferkan ke masing-masing rekening masyarakat penerima dana bantuan sosial tersebut. Sehingga perlu dilakukan pengawasan yang baik terhadap proses pencairan dana bantuan sosial dan pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Melihat pada target pemerintah daerah telah memberikan dana bantuan sesuai dengan proposal yang diajukan dan jumlah penerimanya telah disesuaikan dengan anggaran dana bantuan sosial yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada.

Berdasarkan permasalahan dan data yang dikeluarkan oleh badan keuangan daerah Kabupaten Ngada, telah diketahui bagaimana tingkat pencapaian dan realisasi dari setiap anggaran dan program atau kegiatan yang ada. Sehingga hal tersebut perlu dilakukan pengawasan yang optimal serta pemantauan dari setiap pelaksanaan kegiatan dan penyaluran bantuan ke masyarakat karena melalui pihak bank, hal tersebut diharapkan agar pelaksanaan dana bantuan sosial berjalan sesuai dengan harapan dari masyarakat sehingga kedepannya pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada dapat

berjalan efektif dan semakin terus berkurangnya masyarakat penerima dana bantuan sosial. Dan berdasarkan tingkat pencapaian dari efektivitas anggaran dari Pemerintah dan kuesioner dari masyarakat dapat dilihat bagaimana perbedaan tingkat pencapaian efektivitas sesuai dengan kriteria efektivitas yang telah ditetapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada saat ini sudah terlaksana cukup efektif.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Efektivitas pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada saat ini sudah terlaksana cukup efektif dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kualitas aparatur, sarana dan prasarana serta pengawasan dari pemerintah daerah. Pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada dikatakan cukup efektif dapat dilihat dari segi pencapaian anggaran dan program atau kegiatan yang berfariasi dimulai dari tingkat tidak efektif, sampai dengan efektif dan bagaimana pandangan masyarakat terkait pelaksanaan dana bantuan sosial dalam penilaian atas pernyataan dalam kuesioner terkait dana bantuan sosial dimulai dari penilaian cukup setuju sampai dengan sangat setuju serta semakin berkurangnya masyarakat penerima dana bantuan sosial setiap tahunnya.

Pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada berdasarkan hasil pengelolaan kuesioner atas pernyataan-pernyataan yang telah disebarkan kepada masyarakat penerima dana bantuan diketahui bahwa dari 15 item pernyataan yang disebarkan sesuai dengan pengelolaan data yang disajikan oleh peneliti pencapaian dari setiap pernyataan berkisar 51% sampai dengan 55% tetapi dari pernyataan tersebut masyarakat memilih dari rentan cukup setuju sampai dengan sangat setuju yang berarti ada tindakan nyata atau pelaksanaan nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngada tentang dana bantuan sosial.

Diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Ngada kedepannya lebih aktif dalam mengawasi dan memantau pelaksanaan dana bantuan sosial dalam hal penyerapan atau penggunaan anggaran maupun penatausahaan dana bantuan sosial tersebut agar dana bantuan sosial dapat terealisasi

seluruhnya dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang telah mengajukan proposal dana bantuan sosial sehingga, kedepannya pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada bisa mencapai tingkat efektif sampai dengan sangat efektif dan semakin berkurangnya penilaian buruk dari masyarakat dan resiko terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana bantuan tersebut.

Diharapkan agar pemerintah daerah Kabupaten Ngada memperhatikan dengan baik apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan dan bantuan sosial sesuai dengan indikator atau ukuran dari efektivitas pelaksanaan program atau kegiatan, sehingga kedepannya banyak masyarakat yang dapat memberikan penilaian baik sehingga pelaksanaan dana bantuan sosial di Kabupaten Ngada kedepannya bisa lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Achyani, E, Saleh, S. (2014). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Pontianak Tahun 2009-2013 (Implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang disempurnakan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012). Tesis tidak dipublikasikan. S2 Magister Ek.Pembangunan, Universitas Gadjah Mada.
- Arifin, Djayani Nurdin dan Nina Yusnita. (2017). Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sstudi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). *E-Jurnal Katalogis*, 5 (12).
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eva Yuliantari, N., & Aswitari, L. (2018). Efektivitas Dan Dampak Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Penerima Kube di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 773 - 805.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mariswara, I., Arya Sumerthayasa, P., & Sarna, K. (2016). Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Provinsi Bali. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.